**EFEKTIVITAS PROGRAM KALIMASADA DISPENDUKCAPIL KOTA SURABAYA**

**(STUDI KASUS KECAMATAN PAKAL DAN KECAMATAN BENOWO)**

**Nur Rahmawati**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra

[nurrachma2206@gmail.com](mailto:nurrachma2206@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas program Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi kependudukan) oleh Dispendukcapil Kota Surabaya di Kecamatan Pakal dan Benowo; (2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan program Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan) oleh Dispendukcapil Kota Surabaya di Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo. Menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori pengukuran efektivitas program dari Surisno (2007: 125 – 126) yang didalamnya terdapat lima dimensi yakni, (1) Pemahaman Terkait Program; (2) Tepat Sasaran; (3) Tepat Waktu; (4) Tercapainya Tujuan; (5) Perubahan Nyata. Lokasi penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kalimasada yang ada di wilayah Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo ini sudah efektif, meskipun terdapat beberapa faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaanya.

**Kata Kunci:** *Efektivitas Program, Program Kalimasada, Admnistrasi Kependudukan*

**Abstract**

This study aims to (1) To find out and describe the effectiveness of the Kalimasada program (Awareness Community Administration Population Area) by the Dispendukcapil of Surabaya City in Pakal and Benowo Districts; (2) to find out and describe the factors that influence the implementation of the Kalimasada program (Population Administration Awareness Community Environment Area) by the Surabaya City Population and Civil Registry Office in Pakal and Benowo Districts. Using qualitative research methods, this research was conducted using the theory of measuring program effectiveness from Surisno (2007: 125 – 126) in which there are five dimensions, namely, (1) Program-Related Understanding; (2) Right on Target; (3) On time; (4) Achievement of Goals; (5) Real Change. The location of the research conducted at the Surabaya City Population and Civil Registration Service, Pakal District and Benowo District shows that the implementation of the Kalimasada program in the Pakal District and Benowo District area has been effective, although there are several factors that influence its implementation.

**Keywords:** *Program Effectiveness, Kalimasada Program, Population Administration*

**Pendahuluan**

Manajemen kependudukan (Adminduk) merupakan sekumpulan fungsi untuk menyusun serta mengelola dokumen dan informasi kependudukan untuk pengembangan daftar kependudukan serta pengelolaan data kependudukan dan pemandaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lainnya. (Indonesia, 2019). Sebagai mana suatu sistem manajemen kependudukan, karena kependudukan diharapkan mampu melaksanakan hak administratif kependudukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui peran aktif penduduk dan mendapatkan perlindungan sehubungan dengan pengeluaran dokumen kependudukan tanpa adanya diskriminatif dari pemerintah daerah. Sehubungan dengan agar terpenuhinya *database* kependudukan maka diperlukannya penerapan sanksi administratif bagi penduduk agar tidak adanya diskriminatif sesama penduduk baik penduduk warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dengan harapan terciptanya pengelolaan data kependudukan yang teroganisir, serta menghilangkan diskriminasi dalam pelaksanaan pelayanan penertiban dokumen kependudukan, dan memudahkan promosi iklim investasi di Indonesia.

Tentunya dalam pelaksanaan pelayanan Adminduk diperlukannya adanya inovasi sehingga diharapkannya pelayanan Adminduk membuat masyarakat lebih mudah dalam pengurusannya. Hal ini diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 yang mana merupakan undang – undang perubahan dari UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dibuatnya suatu sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pengurusan yang dilakukan melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) antara lain yakni, pencatatan biodata penduduk, penerbitan kartu keluarga (KK), penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), penerbitan kartu identitas anak (KIA), penerbitan surat keterangan kependudukan, pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan, dan pendataan penduduk non-permanen (Walikota Surabaya, 2019). Program Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk) merupakan salah satu program sensus kependudukan Kota Surabaya yang menginisiasi terciptanya lingkungan/desa Adminduk yang tertata dengan meningkatkan jumlah masyarakat sadar Adminduk. Program tersebut dilaksanakan dengan melantik 62 pengurus RT di setiap Kelurahan Kota Surabaya dan meluncurkan layanan Adminduk di sekitar Rukun Tetangga agar layanan Adminduk lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

Salah satu contoh kasus yang ada dan menjadi latar belakang munculnya program ini adalah masih dianggapnya kepengurusan administrasi kependudukan oleh masyarakat bukan suatu hal yang penting. Seperti kepemilikan kartu keluarga ber-*barcode* yang masih dirasa oleh sebagian warga bukan termasuk hal penting karena mereka merasa bahwa dalam mengurus dokumen tersebut sangat sulit dan ribet maka banyak dari mereka yang merasa tidak perlu membuat KK cukup dengan orang lain tau bahwa itu adalah keluarga mereka.

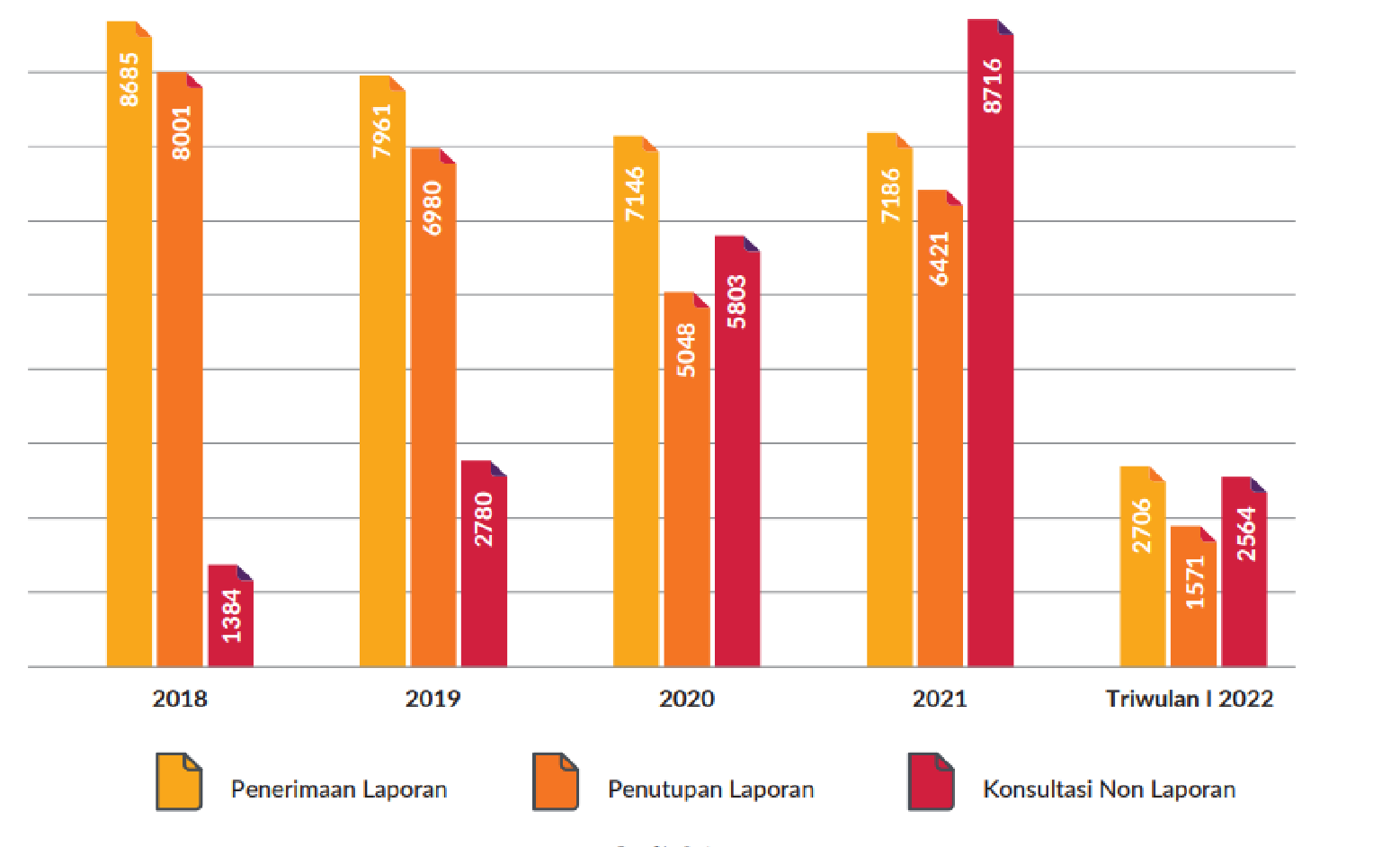
Contoh lainnya yakni kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak). Tujuan dibuatkannya KIA (Kartu Identitas Anak) adalah untuk memberikan perlindungan konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, KIA memiliki beberapa manfaat diantara lain; (1) melindungi pemenuhan atas hak-hak anak, (2) menjamin akses sarana umum untuk anak, (3) sebagai bukti indentifikasi bagi anak apabila mengalami kejadian buruk, (4) untuk mencegah terjadinya perdanganan anak, sert (5) memudahkan anak untuk mendapat akases pelayanan publik. Dapat dilihat bahwa KIA sendiri memiliki banyak manfaat bagi seroang anak, tetapi banyaknya orang tua yang masih menganggap tidak perlunya anak usia 0 – 16 tahun ini memilikinya karena mengganggap mengurus KIA memiliki persyarata yang sulit dan merepotkan.

Dengan dimunculkannya inovasi Program Kalimasada (Kawasan Lingkungan Sadar Adminduk) ini menjawab pertanyaan masyarakat terkait persyaratan yang mudah dan tidak merepotkan karena dapat dilakukan oleh RT Rintisan dengan melalui aplikasi KNG (Klampid *New Generation*). Dalam hal pelaksanaan Program Kalimasada yang telah berjalan dari tahun 2021 ini ingin diketahui apakah dalam program ini sudah berjalan dengan efektiv khusunya di Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo, juga faktor yang memengaruhinya.

**Metode**

Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam kondisi tertentu dalam kehidupan nyata (alamiah), yang tujuannya untuk mempelajari dan memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa fenomena tersebut terjadi dan bagaimana fenomena tersebut terjadi, dengan dilakukannya wawancara serta dokumentasi dalam pengambilan data lapangan. Sedangkan dalam pengukuran efektivitas program digunakannya pengukuran menurut Surisno (2007: 125-126), dengan indikator (1) Pemahaman Terkait Program; (2) Tepat Sasaran: (3) Tepat Waktu; (4) Tercapainya Tujuan: dan (5) Perubahan Nyata. Serta memperhatikan faktor yang memngaruhi dalam pelaksanaan program Kalimasada di Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo. Dengan lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Surabaya, Kecamatan Pakal, dan Kecamatan Benowo. Dalam perolehan keabsahan data dilakukannya dengan mereduksi data, yang dilanjutkan dengan penyajian data serta penarikan kesimpulan.

**Hasil dan Pembahasan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya membuat sebuah inovasi dalam pelayan administrasi kependudukan dalam rangka menerapkan *good government* di Kota Surabaya dengan diluncurkannya SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan nama KNG (Klampid *New Generation*) yang dapat diakses melalui *smartphone* maupun komputer. Hal yang mendasari hal ini adalah adanya maladministrasi yang ada di lingkup pelayanan publik, bahwa substansi laporan paling meningkat yakni sebesar 631 laporan terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan (Republik Indonesia, 2022). Administrasi kependudukan merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi karena menyangkut penentuan status kewarganegaraan yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh warga negara. (Harpy et al., 2022).

**Gambar 1. Maladministrasi kuarter 1 laporan/pengaduan masyarakat lima tahun terkahir 2018 - triwulan I 2022**

*Sumber: Ombudsman RI, 2022*

Inovasi ini bernama Program Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk) yang telah diluncurkan sejak 18 November 2021 ini memiliki dua tujuan utama yakni mewujudkan tertib lingkungan di Kota Surabaya dengan memperbanyak jumlah masyarakat mengenal pentingnya adminduk sendiri, serta mempermudah akses masyarakat dalam mengurus dokumen adminduk agar tidak ternjadinya maladministrasi.

Administrasi kependudukan sendiri menjadi hal yang penting karena hal tersebut merupakan sebuah identitas bagi penduduk yang unik, khas, tunggal dan melekat (Indonesia, 2019) untuk dapat dikenali ataupun diketahui keberadaannya dan sebagai bentuk perlindungan status hak sipil. Selain poin yang telah disampaikan diatas, penting untuk penduduk mengurus administrasi juga adanya kewajiban bagi penduduk dalam pemenuhan data statistik secara nasional terkait peristiwa penting kependudukan, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal juga mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Dalam kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan ini adalah cukup dilakukannya kepengurusan melalui ranah RT yang ada di wilayahnya. Dalam hal ini Kecamatan Pakal diketahui telah memiliki RT Rintisan sebanyak 31 RT yang terbagi di beberapa Kelurahan di wilayah Kecamatan Pakal. Begitupula dengan jumlah RT Rintisan di Kecamatan Benowo yang hampir sama dengan jumlah RT yang ada di wilayah Kecamatan Pakal. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan program Kalimasada telah berjalan dengan efektiv di wilayah Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo maka digunakannya sebuah pengukuran efektivitas program dari Surisno (2007: 125-126) dengan indikator dimensi dibawah ini:

**Pemahaman Terkait Program**

Dalam hal ini baik Kecamatan Pakal maupun Kecamatan Benowo sama-sama memiliki bekal yang telah diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya melalui sosialisasi Program Kalimasada dengan mengundang bakal calon RT dengan tujuan agar bakal calon RT Rintisan ini mengerti dengan benar apa tujuan, visi, misi dari diadakannya program Kalimasada ini.

**Tepat Sasaran**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan sasaran pada program ini adalah seluruh warga di wilayah Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo. Khususnya yang menjadi sasaran yakni warga yang telah berusia wajib memiliki dokumen administrasi negara atau berusia 17 Tahun, dengan mulai dimilikinya KTP (Kartu Identitas Penduduk).

**Tepat Waktu**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memiliki harapan agar program ini selamanya terus berjalan. Mengulas kembali pada awal program ini dijalankan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya hanya menujukk 62 RT Rintisan di wilayah Kelurahan dengan minimal dalam 1 Kecamatan memiliki 2 RT Rintisan. Hingga saat ini semakin banyak Kecamatan di Kota Surabaya yang mendaftarkan RT di wilayahnya untuk menjadi RT Rintisan.

Di Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo sendiri menerapkan timeline dalam 6 bulan terakhir ini, dimulai dari bulan Januari – Juni 2023 ini dalam pelaksanaan program Kalimasada yang menjadi fokus utamanya yakni kepengurusan KK *barcode* dan IKD (Identitas Kependudukan Digital).

**Tercapainya Tujuan**

Dalam proses tercapainya tujuan dari pelaksanaan program Kalimasada ini, Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo telah melakukan banyak upaya untuk membantu RT Rintisan dalam pelaksanan program Kalimasada di wilayahnya, meskipun dalam hal ini Kecamatan hanya sebagai perbantuan pengawasan pelaksanaan program yang dijalankan oleh RT saja. Hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya warga yang telah menyadari pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan.

**Table 1. Jumlah Penduduk ynag Memiliki KK barcode di Kecamatan Pakal**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Penduduk yang Memiliki KK *barcode* | | **L** | **P** | **Jumlah** |
| **Kecamatan** | **Pakal** | **15.960** | **3.678** | **19.638** |
| Kelurahan | Pakal | 2.919 | 630 | 3.549 |
| Kelurahan | Babat Jerawat | 6.616 | 1.595 | 8.211 |
| Kelurahan | Sumber Rejo | 3.320 | 736 | 4.056 |
| Kelurahan | Benowo | 3.105 | 717 | 3.822 |

*Sumber: Data di Kecamatan Pakal*

**Table 2. Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP di Kecamatan Pakal**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP | | **L** | **P** | **Jumlah** |
| **Kecamatan** | **Pakal** | **22.785** | **22.854** | **45.639** |
| Kelurahan | Pakal | 4.073 | 4.038 | 8.111 |
| Kelurahan | Babat Jerawat | 9.616 | 9.882 | 19.498 |
| Kelurahan | Sumber Rejo | 4.724 | 4.602 | 9.326 |
| Kelurahan | Benowo | 4.372 | 4.332 | 8.704 |

*Sumber: Data di Kecamatan Pakal*

**Table 3. Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KK barcode di Kecamatan Benowo**

| Jumlah Penduduk yang Memiliki KK *barcode* | | **L** | **P** | **Jumlah** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kecamatan** | **Benowo** | **18.682** | **4.559** | **23.241** |
| Kelurahan | Kandangan | 6.210 | 1.602 | 7.812 |
| Kelurahan | Sememi | 10.654 | 2.443 | 13.097 |
| Kelurahan | Tambak Oso Wilangun | 1.001 | 314 | 1.315 |
| Kelurahan | Romokalisari | 817 | 200 | 1.017 |

*Sumber: Data Kecamatan Benwo*

**Table 4. Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP di Kecamatan Benowo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP | | **L** | **P** | **Jumlah** |
| **Kecamatan** | **Benowo** | **26.107** | **26.970** | **53.077** |
| Kelurahan | Kandangan | 8.655 | 9.097 | 17.752 |
| Kelurahan | Sememi | 14.854 | 15.329 | 30.183 |
| Kelurahan | Tambak Oso Wilangun | 1.415 | 1.414 | 2.829 |
| Kelurahan | Romokalisari | 1.183 | 1.130 | 2.313 |

*Sumber: Data Kecamatan Benowo*

Dari tabel diatas jika disandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Pakal yakni sebanyak 60,877 jiwa, dan penduduka di Kecamatan Benowo sebanyak 70,988 jiwa. Maka hal ini membuktikan bahwa kesadaran penduduk di wilayah Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo telah memiliki kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

**Dampak Nyata**

Dampak dari pelaksanaan program Kalimasada ini tentu saja tidak hanya dirasakan oleh warga yang telah memiliki dokumen adminitrasi kependudukan. Seperti setelah mereka memiliki dokumen adminitrasi kependudukan mereka telah merasakan berbagai kemudahan dalam mengurus hal lainnya. Tetapi juga para pelaksana seperti bagi pihak Kecamatan atau Pemerintah yang dalam melakukan intervensi dalam bentuk bantuan semakin mudah karena hal tersebut akan lebih tepat sasaran.

**Faktor yang Memengaruhi**

Terdapat dua faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan program Kalimasada ini, yang pertama yakni faktor pendukung, dan kedua faktor penghambat.

1. **Faktor Pendukung**

Baik di Kecamatan Pakal maupun Kecamatan Benowo, memiliki RT Rintisan yang sangat bersemangat dalam pelaksanaan program Kalimasada di wilayahnya. Sehingga mereka gencar melakukan sosialisasi kepada warganya akan pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan ini.

1. **Faktor Penghambat**

Di Kecamatan Pakal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Kalimasada ini adalah kurangnya sosialisasi IKD (Identittas Kependudukan Digital) karena aplikasi IKD sendiri hanya dapat diakses di beberapa *smartphone* yang ada. Bagi kepemilikan iphone sendiri memiliki proses yang sedikit rumit dalam mengurus IKD. Sedangkan di Kecamatan Benowo masih banyak masyarakat yang kurang percaya akan kepengurusan dokumen administrasi kependudukan dilakukan di RTnya, mereka merasa sudah seharusnya mengurus dokumen administrasi kependudukan ini di tingkat Kelurahan ataupun Kecamatan bukan melalui RTnya, dan masih kurang lihainya beberapa RT Rintisan dalam penggunaan *smartphone*.

Berikut adalah table perbandingan dalam pelaksanaan program Kalimasada di wilayah Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo:

**Table 5. Perbandingan Pelaksanaan Program Kalimasada di Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo**

| No | Dimensi | Kecamatan Pakal | Kecamatan Benowo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemahaman Terkait Program | Dilakukannya sosialisasi kepada RT Rintisan dan pihak Kecamatan Pakal sebagai perbantuan pengawasan RT Rintisan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya | Dilakukannya sosialisasi kepada RT Rintisan dan pihak Kecamatan Benowo sebagai perbantuan pengawasan RT Rintisan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya |
| 2. | Tepat Sasaran | Setelah dilakukannya wawancara dengan RT Rintisan yang ada di wilayah Kecamatan Pakal, yakni Kelurahan Pakal, Raci pelaksanaan program Kalimasada yang ada di sana sudah mencapai 90% khususnya dalam pelaksaan program pembuatan KK *barcode.* | Sesuai dengan arahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dalam pelaksanaan program ini Kecamatan Benowo dan RT Rintisan berusaha untuk program ini dapat dilaksanakan di seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayahnya. |
| 3. | Tepat Waktu | Dalam program Kalimasada sendiri tidak terdapat tenggat waktu apapun dalam pelaksanaannya, tetapi dalam 6 bulan kebelakang yakni Januari – Juni 2023 ini timeline yang ada di Kecamatan Pakal fokus utama dalam pelaksanaan program Kalimasada adalah pembaruan KK menjadi KK *barcode* dan IKD (Identitas Kependudukan Digital). | Dalam program Kalimasada sendiri tidak terdapat tenggat waktu apapun dalam pelaksanaannya, tetapi dalam 6 bulan kebelakang yakni Januari – Juni 2023 ini timeline yang ada di Kecamatan Benowo fokus utama dalam pelaksanaan program Kalimasada adalah pembaruan KK menjadi KK *barcode* dan IKD (Identitas Kependudukan Digital). |
| 4. | Tercapainya Tujuan | Dalam pelaksanaan program Kalimasada yang ada di Kecamatan Pakal telah tercapai dengan dibuktikannya hampir seluruh masyarakat di wilayahnya telah memiliki dokumen kependudukan Hal ini dilihat dari keseluruhan total warga yang ada di wilayah Kecamatan Pakal sebanyak 60,877 jiwa, sudah banyak dari warga tersebut memiliki dokumen administrasi kependudukan. yakni sebanyak 19.638 jiwa telah memiliki KK *barcode* dan sebanyak 45.639 jiwa telah memiliki KTP. | Dalam pelaksanaan program Kalimasada yang ada di Kecamatan Benowo telah tercapai dengan dibuktikannya hampir seluruh masyarakat di wilayahnya telah memiliki dokumen kependudukan Hal ini dilihat dari keseluruhan total warga yang ada di wilayah Kecamatan Benowo sebanyak 70.988 jiwa, sudah banyak dari warga tersebut memiliki dokumen administrasi kependudukan. yakni sebanyak 23.241 jiwa telah memiliki KK *barcode* dan sebanyak 53.077 jiwa telah memiliki KTP. |
| 5. | Dampak Nyata | Dari terlaksananya program Kalimasada ini dampak yang terasa bagi Kecamatan yakni dimudahnya bagi pihak kecamatan melakukan intervensi saat memberikan bantuan bagi pihak masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat yakni mudahnya kepengurusan lainnya jika memiliki dokumen administrasi kependudukan. | Dari terlaksananya program Kalimasada ini dampak yang terasa bagi Kecamatan yakni dimudahnya bagi pihak kecamatan melakukan intervensi saat memberikan bantuan bagi pihak masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat yakni mudahnya kepengurusan lainnya jika memiliki dokumen administrasi kependudukan. |
| 6. | Faktor Pendukung | semangatnya RT Rintisan dalam melaksanakan tugasnya, baik mensosialisasikan program Kalimasada, juga dalam membantu masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan. Kedua, banyak masyarakat di wilayah Kecamatan Pakal yang percaya dengan RT Rintisan dalam mengurus administrasi kependudukan miliknya tanpa perlu jauh-jauh ke Kelurahan maupun Kecamatan | Semangatnya RT Rintisan dalam melaksanakan tugasnya, baik mensosialisasikan program Kalimasada, juga dalam membantu masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan. |
| 7. | Faktor Penghambat | Meskipun sudah banyak masyarakat yang telah memiliki KTP tetapi masih jarangnya masyarakat wilayah Kecamatan Pakal yang ingin mengurus IKD (Identitas Kependudukan Digital) karena dalam mengurusnya masih harus datang ke Kecamatan Pakal. | Sekalipun semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya memiliki administrasi kependudukan, tetapi warga dibandingkan mengurus di ranah RT Rintisan masih banyak yang lebih mempercayai kelurahan atau kecamatan. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa lebih mudah kepengurusan secara *offline* karena dalam mengurus administrasi kependudukan terkadang muncul pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan, maka masih banyak yang mengurus di Kecamatan Benowo.  Selain dikarenakan masyarakat yang masih banyak yang kurang percaya mengurus administrasi kependudukan melalui RT Rintisan, hambatan lainnya adalah keterbatasan RT Rintisan dalam membantu masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan secara *online*, hal ini dikarenakan kurang canggihnya telepon seluler yang dimiliki oleh RT Rintisan. |

*Sumber: Diolah Peneliti*

**Penutup**

Pelaksanaan program Kalimasada di Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo secara garis besar sudah berjalan dengan efektif karena semua sudah sesuai dengan indikator yang ada pada teori efektivitas program menurut Surisno (2007: 125-126). Faktor yang memengaruhi program:

1. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program Kalimasada
2. Di Kecamatan Pakal:

Semangatnya RT Rintisan dalam melaksanakan program Kalimasada serta masyarakat yang percaya dengan RT Rintisan dalam mengurus administrasi kependudukan miliknya.

1. Di Kecamatan Benowo:

Semangatnya RT Rintisan dalam melaksanakan program Kalimasada.

1. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Program Kalimasada
2. Di Kecamatan Pakal:

Meskipun sudah banyak masyarakat yang telah memiliki KTP tetapi masih jarangnya masyarakat wilayah Kecamatan Pakal yang ingin mengurus IKD (Identitas Kependudukan Digital) karena dalam mengurusnya masih harus datang ke Kecamatan Pakal.

1. Di Kecamatan Benowo:

Masih banyak masyarakat yang kurang mempercayai RT Rintisan di wilayahnya, serta terdapat keterbatasan bagi RT Rintisan dalam membantu mengurus administrasi kependudukan karena kurang lihainya penguasaan terhadap *smartphone*.

**Referensi**

**Artikel**

Harpy, M., Muchtolifah, M., & Nisa, F. L. (2022). The Klampid New Generation Application as a Support for the Quality of E-Government Based Public Services in the City of Surabaya. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, *14*(2), 189–203. https://doi.org/10.15575/jpan.v14i2.21731

Republik Indonesia, O. (2022). *Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih Ketua Ombudsman RI*.

**Perundangan**

Indonesia, P. R. (2019). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354*, 1–13.

Walikota Surabaya. (2019). Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. *Sekretariat Daerah Kota Surabaya*, *1965*.